

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2024
AUDITED

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Bengkulu - Bengkulu 38225

Telp. 073621585 Fax. 073621585

E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Telp. 073621585 Fax. 073621585

Bengkulu - Bengkulu 38225

E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bengkulu, 05 Mei 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris,

H. NURSANI, S.H.
NIP.196606101991031005

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Daftar Tabel dan Lampiran	6
Pernyataan Tanggung Jawab	9
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca.....	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum.....	23
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Bengkulu.....	23
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	24
A.3. Basis Akuntansi	24
A.4. Dasar Pengukuran	24
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	25
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	33
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	33
B.2. Belanja	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	40
C.1. Aset Lancar.....	40
C.2. Aset Tetap	42
C.3. Aset Lainnya	48
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	49
C.5. Ekuitas.....	51
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	52
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	52
D.2. Beban Pegawai.....	52

D.3.	Beban Persediaan.....	53
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	53
D.5.	Beban Pemeliharaan	54
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	55
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	55
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	56
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	56
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	57
D.11.	Beban Lain-lain.....	57
D.12.	Kegiatan Non Operasional.....	58
D.13.	Pos Luar Biasa	58
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	59
E.1.	Ekuitas Awal	60
E.2.	Surplus (Defisit) LO.....	60
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	60
E.4.	Koreksi Menambah/Mengurangi	60
E.4.1.	Penyesuaian Nilai Aset	60
E.4.2.	Koreksi Nilai Persediaan	60
E.5.	Transaksi Antar Entitas.....	62
	Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2024 disajikan pada lampiran.....	63
E.6.	Ekuitas Akhir	64
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	65
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	65
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	65
	Laporan-laporan Pendukung.....	69
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	70
	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	73

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 dan 2023	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023	11
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	27
Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	30
Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	31
Tabel 6 Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	33
Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2024	33
Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2024 dan 2023	34
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024	34
Tabel 10 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024	35
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023	35
Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023	36
Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023	37
Tabel 14 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023	38
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023	38
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023	39
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023	39
Tabel 18 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023	40
Tabel 19 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	40
Tabel 20 Rincian Uang Muka Belanja	41
Tabel 21 Rincian Piutang Bukan Pajak	41
Tabel 22 Rincian Aset Tetap	42
Tabel 23 Rincian Saldo Tanah	43
Tabel 24 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	47
Tabel 25 Rincian Aset Lainnya	48
Tabel 26 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023	49
Tabel 27 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	49
Tabel 28 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2024	52
Tabel 29 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023	52
Tabel 30 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023	53
Tabel 31 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023	54
Tabel 32 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023	54
Tabel 33 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023	55
Tabel 34 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	55
Tabel 35 Rincian Beban Bantuan Sosial	56
Tabel 36 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	57
Tabel 37 Rincian Beban Piutang tak Tertagih	57
Tabel 38 Rincian Beban Lain-lain	58
Tabel 39 Rincian Kegiatan Non Operasional	58
Tabel 40 Rincian Pos Luar Biasa	59
Tabel 41 Rincian Koreksi Nilai Persediaan	60

Tabel 42	Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024	61
Tabel 43	Rincian Koreksi Lain-lain	62
Tabel 44	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas.....	62
Tabel 45	Rincian Transfer Masuk	63
Tabel 46	Rincian Pengesahan Hibah.....	63
Tabel 47	Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024	71

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tinggi Bengkulu

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan Bengkulu - Bengkulu 38225

Telp. 073621585 Fax. 073621585 E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bengkulu, 05 Mei 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris,

H. NURSANI, S.H.
NIP.196606101991031005

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu Semester II Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dengan realisasi nya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.40,356,065.- atau mencapai 137 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.29,425,000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp.22,496,474,905.- atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.22,599,318,000.-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	29,425,000	40,356,065	137	32,772,603
Belanja Negara	22,599,318,000	22,496,474,905	100	21,417,958,963

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2024 dan 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.35,563,295,420,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.24,450,620,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.35,515,986,533,-; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.22,858,267.-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.20,729,627,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.20,729,627,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0. Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp.35,542,565,793.-

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	24,450,620	23,571,400	879,220	3.73
Aset Tetap	35,515,986,533	34,708,943,596	807,042,937	2.33
Aset Lainnya	22,858,267	0	22,858,267	0
Jumlah Aset	35,563,295,420	34,732,514,996	830,780,424	2.39
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	20,729,627	8,391,890	12,143,049	144.70
Kewajiban Jangka Panjang				
Jumlah Kewajiban	20,729,627	8,391,890	12,337,787	147.02
Ekuitas				
Ekuitas	35,542,565,793	34,724,123,156	818,442,637	2.36
Jumlah Ekuitas	35,542,565,793	34,724,123,156	818,442,637	2.36
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	35,563,295,420	34,732,514,996	830,780,424	2.39

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.40,161,327,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.22,830,015,530,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(22,789,854,203,-).

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.(0,-) dan surplus(defisit) sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar Rp.(22,789,854,203,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar 34,724,123,156,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp.(22,789,854,203,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.(0,-) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.22,456,118,840,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.35,542,565,793,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2024			TA 2023
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	29,425,000	40,356,065		32,772,603
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		29,425,000	40,356,065		32,772,603
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	19,087,214,000	19,003,360,333		18,000,872,239
2.	Belanja Barang	B.2.2.	2,990,104,000	2,973,830,353		3,000,616,674
3.	Belanja Modal	B.2.3.	522,000,000	519,284,219		416,470,050
	Jumlah Belanja Negara		22,599,318,000	22,496,474,905		21,417,958,963

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.1. 2.	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1. 3.	0	0
Persediaan	C.1. 4.	24,450,620	23,571,400
Jumlah Aset Lancar		24,450,620	23,571,400
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	29,484,991,000	28,332,813,000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	4,949,499,091	5,294,877,665
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	10,058,527,219	9,660,923,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	8,680,950	18,680,950
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(8,985,711,727)	(8,598,351,019)
Jumlah Aset Tetap		35,515,986,533	34,708,943,596
Aset Lainnya	C.3		
Aset Lain-Lain	C.3. 1.	477,058,574	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 2.	(454,200,307)	0
Jumlah Aset Lainnya		22,858,267	0
Jumlah Aset		35,563,295,420	34,732,514,996
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		

Utang kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	20,534,889	8,391,890
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4. 2.	194,738	0
Uang Muka dari KPPN	C.4. 3.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		20,729,627	8,391,890
Jumlah Kewajiban		20,729,627	8,391,890

EKUITAS

Ekuitas	C.5	35,542,565,793	35.060.396.979
Jumlah Ekuitas		35,542,565,793	35,126,854,949
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		35,563,295,420	35,135,246,839

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	40,161,327	34,765,936
Jumlah Pendapatan		40,161,327	34,765,936
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	19,013,015,433	18,007,723,189
Beban Persediaan	D. 3	75,550,200	73,687,100
Beban Barang dan Jasa	D. 4	1,678,594,839	1,876,521,980
Beban Pemeliharaan	D. 5	903,860,106	895,726,006
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	317,433,937	215,118,190
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	841,561,015	787,930,954
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		22,830,015,530	21,856,707,369
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(22,789,854,203)	(21,821,941,433)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	(0)	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(22,789,854,203)	(21,821,941,433)
Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(22,789,854,203)	(21,821,941,433)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas Awal	E.1	34,724,123,156	35,060,396,979
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E.2	(22,789,854,203)	(21,821,941,433)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E.3	0	0
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.4		0
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E.4.5	0	0
Jumlah Koreksi Ekuitas		0	0
Transaksi Antar Entitas	E.5	22,456,118,840	21,485,667,610
Ekuitas Akhir		35,542,565,793	34,724,123,156

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

*V. CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Bengkulu

Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung. Sehingga terjalin kesinambungan dengan visi Mahkamah Agung RI yang menginginkan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas_pokoknya.

Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bengkulu

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan Rencana Strategis, Pengadilan Tinggi Bengkulu akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat Rencana Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rencana Strategis yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan agar lebih efektif dan efisien
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tinggi Bengkulu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs

tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Tabel 6 Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Negara dan Hibah		
Penerimaan Perpajakan	0	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	29,425,000	29,425,000
Hibah		
Jumlah Pendapatan dan Hibah	29,425,000	29,425,000
Belanja		
Belanja Pegawai	17,702,214,000	18,955,339,000
Belanja Barang	2,890,104,000	2,990,104,000
Belanja Modal	0	522,000
Jumlah Belanja	20,592,318,000	22,599,318,000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah: Rp.
40,356,065.-*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.40,356,065 atau mencapai 137 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.29,425,000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	29,425,000	31,345,650.-	106.53
2.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	9,010,415	0

3.	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	0	0	0
Total Pendapatan		29,425,000	40,356,065	137.15

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp7,388,724. atau 22.55 persen dibandingkan periode yang sama TA 2023.

Hal ini disebabkan karena pada TA 2024 terdapat penyesuaian tarif sewa rumah dinas berdasarkan SK Walikota Bengkulu Nomor 70 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun 2023 sehingga pendapatan dari sewa rumah dinas meningkat.

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	31,150,912	24,905,677	6,245,235	25.08
2.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	9,010,415	7,767,567	1,242,848	16
3.	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	0	99,359	(99,359)	(100)
Total Pendapatan		40,161,327	32,772,603	7,388,724	22.55

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp. 22,496,474,905.-

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Bengkulu per 31 Desember TA 2024 adalah sebesar Rp.22,496,474,905 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99.54% dari anggaran senilai Rp.22,599,318,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

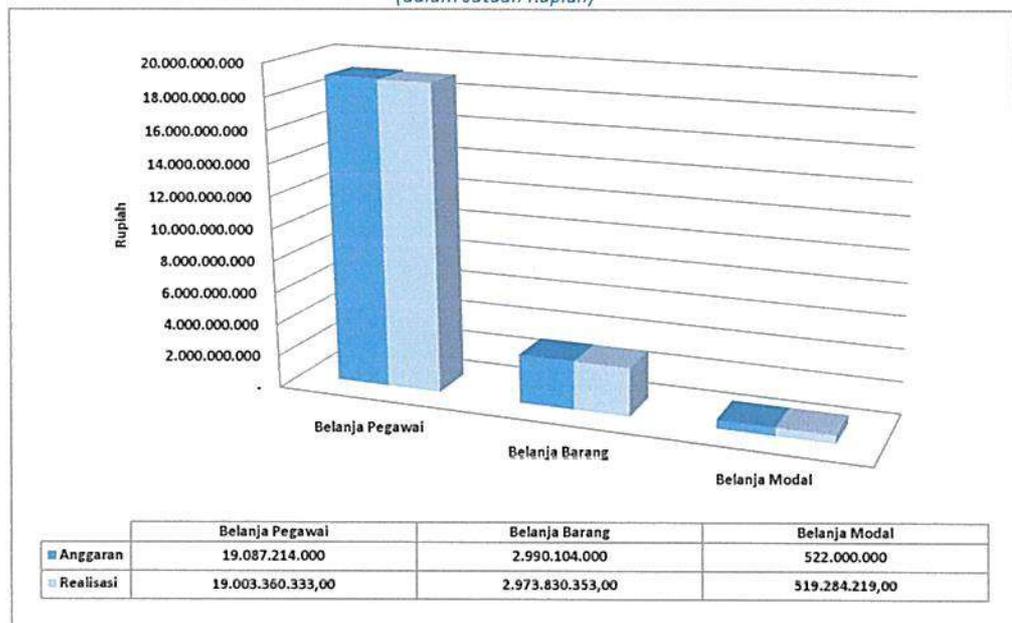
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2024		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	19,087,214,000	19,076,163,053	99.94
Belanja Barang	2,990,104,000	2,973,830,353	99.46

Belanja Modal	522,000,000	519,284,219	99.48
Total Belanja Bruto	22,599,318,000	22,569,277,625	99.87
Pengembalian Belanja	0	72,802,720	0
Total Belanja Netto	22,599,318,000	22,496,474,905	99.54

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan SAKTI Tahun 2024 & 2023

Realisasi Belanja Negara mengalami peningkatan sebesar Rp1,078,515,942 atau sebesar 5.04 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil pada awal Tahun 2024 dan adanya kenaikan terhadap Tunjangan Fungsional Pejabat Negara (Hakim) di Triwulan IV TA 2024. Selain itu, di Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu juga mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan berupa anggaran untuk Belanja Modal di akhir Triwulan III TA 2024.

Perbandingan realisasi belanja TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	19,003,360,333	18,000,872,239	1,002,488,094	5.57

Belanja Barang	2,973,830,353	3,000,616,674	(26,786,321)	(0.89)
Belanja Modal	519,284,219	416,470,050	102,814,169	24.69
Total Belanja	22,496,474,905	21,417,958,963	1,078,515,942	5.04

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai : Rp.
19,003,360,333

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Bengkulu per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp.19,003,360,333 dan Rp.18,000,872,239.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1,002,488,094.- atau 5.57 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 pada periode yang sama. Hal ini disebabkan antara lain karena terdapat kenaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil pada awal TA 2024 dan terdapat kenaikan Tunjangan Fungsional Pejabat Negara (Hakim) di Triwulan IV TA 2024.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	4,536,542,540	4,246,809,940	289,732,600	6.82
Belanja Pembulatan Gaji PNS	53,549	58,282	(4,733)	(8.12)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	350,456,680	329,548,640	20,908,040	6.34
Belanja Tunj. Anak PNS	74,168,058	69,036,322	5,131,736	7.43
Belanja Tunj. Struktural PNS	93,870,000	91,845,000	2,025,000	2.20
Belanja Tunj. Fungsional PNS	10,019,583,000	9,604,602,000	414,981,000	4.32
Belanja Tunj. PPh PNS	2,011,134,625	1,809,990,000	201,144,625	11.11
Belanja Tunj. Beras PNS	182,261,460	182,867,580	(606,120)	(0.33)
Belanja Uang Makan PNS	547,964,000	573,351,000	(25,387,000)	(4.43)
Belanja Tunjangan Umum PNS	47,385,000	49,555,000	(2,170,000)	(4.38)
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	1,081,350,000	1,075,200,000	6,150,000	0.58
Belanja Uang Lembur	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	19,076,163,053	18,032,737,269	912,031,643	5.06
Pengembalian Belanja	72,802,720	31,865,030	40,937,690	128.47
Total Belanja Netto	19,003,360,333	18,000,872,239	1,002,488,094	5.57

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang : Rp.
2,973,830,353.-

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Bengkulu per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp2,973,830,353.- dan Rp3,000,616,674.

Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar 0.89 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang Tahun 2023. Hal ini disebabkan antara lain karena menurunnya pagu anggaran untuk Belanja Barang pada DIPA Pengadilan Tinggi Bengkulu di TA 2024, dimana pada TA 2024 tidak terdapat Pagu Anggaran untuk Belanja Barang Non Operasional (Belanja Barang Ekstrakomptable) yang tidak terdapat pada Tahun 2024 ini.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024 Realisasi	TA 2023 Realisasi	Perubahan	
Belanja Barang Operasional	708,717,958	788,082,049	(79,364,091)	(10.07)
Belanja Barang Non Operasional	0	77,177,000	(77,177,000)	(100)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	85,598,010	66,966,900	18,631,110	27.82
Belanja Jasa	967,388,932	974,937,388	(7,548,456)	(0.77)
Belanja Pemeliharaan	894,691,516	878,335,227	16,356,289	1.86
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	317,433,937	215,118,190	102,315,747	47.56
Total Belanja Brutto	2,973,830,353	3,000,616,754	26,786,401	(0.89)
Pengembalian Belanja	0	80	(80)	(100)
Total Belanja Netto	2,973,830,353	3,000,616,674	26,786,321	(0.89)

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja
Modal :
Rp.519,284,219.

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Bengkulu per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp519,284,219.- dan Rp416,470,050. Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2023 pada periode yang sama. Hal ini disebabkan antara lain meningkatnya pagu anggaran Belanja Modal pada TA 2024. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 14 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan & Mesin	519,284,219	416,470,050	102,814,169	24.69
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0,00
Total Belanja Brutto	519,284,219	416,470,050	102,814,169	24.69
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	519,284,219	416,470,050	102,814,169	24.69

a) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi tersebut pada TA 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2023.

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp.519,284,219, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 pada periode yang sama.

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	519,284,219	416,470,050	102,814,169	24.69
Total Belanja Brutto	519,284,219	416,470,050	102,814,169	24.69
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	519,284,219	416,470,050	102,814,169	24.69

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan Realisasi TA 2023 pada periode yang sama. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada satker Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Penambah Daya Listrik dan Jaringan	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp24,450,620 dan Rp.23,571,400 . Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Tinggi Bengkulu per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 18 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
Persediaan	24,450,620	23,571,400
Total Aset Lancar	24,450,620	23,571,400

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran: Rp.0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 19 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	-----	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.2. Uang Muka Belanja (prepayment)

Uang Muka Belanja
(prepayment): Rp.0

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 . Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Tabel 20 Rincian Uang Muka Belanja (Prepayment)

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2024	31 Desember TA 2023
1.	-----	0	0
Jumlah		0	0

C.1.3. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan
Pajak: Rp.0

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 . Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Piutang Bukan Pajak
TA 2024

No.	Debitur	31 Desember 2024	31 Desember TA 2023
1.	-----	0	0
Jumlah Total		0	0

C.1.4. Persediaan

Persediaan :
Rp24,450,620,-

Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp24,450,620,- dan Rp23,571,400,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Barang Konsumsi	21,245,000	21,663,900
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	3,205,620	1,887,500
Total		24,450,620,-	23,571,400,-

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp
35,515,986,533

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 tersaji sebesar Rp35,515,986,533.- dan Rp34,708,943,596.-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan
1	Tanah	29,484,991,000	28.332.813.000	1,152,178,000
2	Peralatan dan Mesin	4,949,499,091	5,294,877,665	(345,378,574)
3	Gedung dan Bangunan	10,058,527,219	9,660,923,000	397,604,219
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	8,680,950	18.680.950	(10,000,000)
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Jumlah		44,501,698,260	43,307,294,615	1,194,403,645
Akumulasi Penyusutan		(8,985,711,727)	(8,598,351,019)	(387,360,708)
Nilai Buku Aset Tetap		35,515,986,533	34,708,943,596	807,042,937

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp.29,484,991,000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.29,484,991,000 dan Rp.28.332.813.000. Nilai Perolehan Aset berupa Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp.29,484,991,000.-, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 pada periode yang sama.

Mutasi transaksi terhadap Tanah per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	28,332.813.000
Mutasi Tambah	
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	1,152,178,000
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2024	29,484,991,000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku 31 Desember 2024	29,484,991,000

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 25 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	2.01.01.01.002.1	1.195	A 1429085	Pemerintah RI cq. MARI	Rumah Dinas Hakim Tinggi	491.231.000
2.	2.01.01.01.002.2	2.010	A 1429094	Pemerintah RI cq. MARI	Rumah Dinas Hakim Tinggi	904.886.000
3.	2.01.01.01.002.3	1.933	A 1430646	Pemerintah RI cq. MARI	Rumah Dinas KPT dan WKPT	4.745.422.000
4.	2.01.01.01.002.4	586	07.04.03.09.4.00011	Pemerintah RI cq. MARI	Rumah Dinas Hakim Tinggi	1.480.378.000
5.	2.01.01.04.001.1	8.958	07.04.03.04.4.00083	Pemerintah RI cq. MARI	Gedung Kantor PT Bengkulu	20.710.896.000

6.	2.01.02.02.002.1	1.015	07.04.000000006.0	Pemerintah RI cq. MARI	Tanah Kosong yang Diperuntukkan	1,152,178,000
----	------------------	-------	-------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------

Jumlah	29,484,991,00000
--------	------------------

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp.
4,949,499,091

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4,949,499,091 dan Rp5,294,877,665 .

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	5,294,877,665
Mutasi Tambah	
Pembelian	121,680,000
Hibah Masuk	0
Transfer Masuk	0
Reklas Masuk	61,700,000
Mutasi Kurang	
Penghentian Aset dari Penggunaan	467,058,574
Reklas Keluar	61,700,000
Saldo per 31 Desember 2024	4,949,499,091
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(4,136,953,303)
Nilai Buku 31 Desember 2024	812,545,788

Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp183,380,000. Mutasi nilai aset Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mutasi tambah :

Pembelian dari pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa 6 unit AC Split senilai Rp.59,980,000,- dan 2 unit Alat Pendingin Lainnya (AC Standing) senilai Rp.61,700,000,-

Mutasi kurang :

Penghentian aset dari penggunaan dalam kegiatan operasional karena sudah rusak berat

senilai Rp467,058,574,-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
10,058,527,219,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.10,058,527,219,- dan Rp.9,660,923,000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	9,660,923,000
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai	397,604,219
Belanja Modal	0
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2024	10,058,527,219
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(4,848,758,424)
Nilai Buku 31 Desember 2024	5,209,768,795

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.10,058,527,219, mengalami peningkatan jika dibandingkan periode yang sama pada Tahun 2023 karena adanya Pengembangan Nilai Bangunan melalui KDP berupa pembangunan pagar kantor.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan , Irigasi,
dan Jaringan : Rp.0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan PRp.0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	0
----------------------------	---

Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai	0
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku 31 Desember 2024	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya:
Rp.8.680.950*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 8.680.950,- dan Rp. 18.680.950,-.

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp.8.680.950,- terdiri dari Aset Monografi, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2023 disebabkan karena adanya Penghentian Aset dari Penggunaan karena sudah rusak berat.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	18,680.950
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai	
Penghapusan Aset	0
Penghentian Aset dari Penggunaan	10,000,000
Saldo per 31 Desember 2024	8,680.950
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0

Nilai Buku 31 Desember 2024

8,680,950

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp. 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp.
(8,985,711,727)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp.(8,985,711,727) dan Rp.(8,598,351,019).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah ini, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 26 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	29,484,991,000	0	29,484,991,000
2	Peralatan dan Mesin	4,949,499,091	(4,136,953,303)	812,545,788
3	Gedung dan Bangunan	10,058,527,219	(4,848,758,424)	5,209,768,795
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	8.680.950	0	8.680.950
	Jumlah	44,501,698,260	(8,985,711,727)	35,515,986,533

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.22,858,267.- dan Rp.0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Tabel 27 Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	TA 2023
1	Aset Lain-Lain	477,058,574	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	477,058,574	0
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(454,200,307)	0
	Nilai buku Aset Lainnya	22,858,267	0

C.3.1 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp.477,058,574.-

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.477,058,574.- dan Rp.0 . Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Tinggi Bengkulu serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	477,058,574
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2024	477,058,574

C.3.2 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan/Amor
tisasi Aset Lainnya
:
Rp.454,200,307

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp.454,200,307 dan Rp.0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka
Pendek :
Rp.20,729,627

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.20,729,627 dan Rp.8,391,890. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Tinggi Bengkulu per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 28 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
Utang Kepada Pihak Ketiga	20,534,889	8,391,890
Pendapatan Diterima Dimuka	194,738	0
Jumlah	22,858,267	8,391,890

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp.20,534,889

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.20,534,889 dan Rp.8,391,890 . Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Tinggi Bengkulu per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17,080,000	Adalah Kekurangan Tunj. Fungsional Pegawai Bulan Desember Tahun 2024
2.	Beban Langganan Internet	2,480,850	Adalah Beban Langganan Internet Bulan Desember Tahun 2024
3.	Beban Langganan Telepon	105,839	Adalah Beban Langganan Telepon Bulan

		Desember 2024	
4.	Beban Langganan PDAM	868,200	Adalah Beban Langganan Air Bulan Desember 2024
Jumlah		20,534,889	

Utang yang Belum
Ditagihkan:
Rp.194,738

C.4.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.194,738 dan Rp.0 . Pendapatan Diterima Dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas Negara tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Negara tersebut. Adapun rincian Pendapatan Diterima Dimuka Pengadilan Tinggi Bengkulu per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	194,738	Adalah pendapatan sewa ruangan dharmayukti karini dengan jangka waktu sewa selama 1 Tahun terhitung 1 Oktober 2024 sd 30 September 2025
Jumlah		194,738	

C.4.3 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp.0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5. Ekuitas

Ekuitas:
Rp.
35,542,565,793 Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.35,542,565,793 dan Rp.34,724,123,156. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbP
: Rp.40,161,327

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.40,161,327 dan Rp.34,765,936 . Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 31 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	29,425,000	40,161,327	136.49
Total Pendapatan		29,425,000	40,161,327	136.49

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai :
Rp.19,013,015,433

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.19,013,015,433 dan Rp.18,007,723,189.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 17 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	4,536,542,540	4,246,611,140	289,931,400	6.83
Beban Pembulatan Gaji PNS	50,829	58,236	(7,407)	(12.72)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	350,456,680	329,200,480	21,256,200	6.46
Beban Tunj. Anak PNS	74,168,058	68,918,298	5,249,760	7.62
Beban Tunj. Struktural PNS	93,870,000	91,845,000	2,025,000	2.20
Beban Tunj. Fungsional PNS	9,963,863,000	9,573,402,000	390,461,000	4.08

Beban Tunj. PPh PNS	2,011,134,625	1,809,863,505	201,271,120	11.12
Beban Tunj. Beras PNS	182,261,460	182,867,580	(606,120)	(0.33)
Beban Uang Makan PNS	547,677,000	573,064,000	(25,387,000)	(4.43)
Beban Tunjangan Umum PNS	47,385,000	49,555,000	(2,170,000)	(4.38)
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	1,081,350,000	1,075,200,000	6,150,000	0.57
Beban Gaji Pokok PPPK	89,700,800	0	89,700,800	0
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,681	0	1,681	0
Beban Tunj. Fungsional PPPK	14,840,000	0	14,840,000	0
Beban Tunj. Beras PPPK	2,027,760	0	2,027,760	0
Beban Uang Makan PPPK	17,686,000	0	17,686,000	0

Total Beban Pegawai	19,013,015,433	18,007,723,189	1,005,292,294	5.58
----------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan
: Rp.75,550,200

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.75,550,200 dan Rp.73,687,100.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	75,550,200	73,687,100	1,863,100	2.53
-----	0	0	0	0,00
Total Beban Persediaan	75,550,200	73,687,100	1,863,100	2.53

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang &
Jasa :
Rp.1,678,594,839

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1,678,594,839 dan Rp.1,876,521,980. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	637,758,185	618,961,643	18,796,542	3,04
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,860,923	10,207,000	(346,077)	(3.39)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	51,072,000	84,468,000	(33,396,000)	(39.54)
Beban Barang Operasional Lainnya	12,507,700	71,926,366	(59,418,666)	(82.61)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	77,177,000	(77,177,000)	(100)
Beban Langganan Telepon	1,493,138	1,487,540	5,598	0.38
Beban Langganan Air	7,910,300	5,317,300	2,593,000	48.77
Beban Sewa	956,392,593	967,127,131	(10,734,538)	(1.11)
Beban Jasa Lainnya	1,600,000	1,600,000	0	0
Total Beban Barang dan Jasa	1,678,594,839	1,876,521,980	(197,927,141)	10.55)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan:
Rp.903,860,106

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.903,860,106 dan Rp.895,726,006. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	433,368,587	430,773,255	2,595,332	0.60
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	99,990,720	109,873,640	(9,882,920)	(8.99)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	361,332,209	337,688,252	23,643,957	7.00
Beban Persediaan bahan untuk	9,168,590	17,390,859	(8,222,269)	(47.28)

Pemeliharaan

Total Beban Pemeliharaan	903,860,106	895,726,006	8,134,100	0.91
--------------------------	-------------	-------------	-----------	------

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas :
Rp.317,433,937

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.317,433,937 dan Rp.215,118,190 . Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	308,133,937	207,918,190	100,215,747	48.20
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	9,300,000	7,200,000	2,100,000	29.17
Beban Perjalanan Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	317,433,937	215,118,190	102,315,747	47.56

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat : Rp.0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan	0	0	0	0

kepada Masyarakat/Pemda				
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.841,561,015

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.841,561,015 dan Rp.787,930,954. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	262,938,892	247,568,528	15,370,364	6.21
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	570,947,366	540,362,426	30,584,940	5.66
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional	7,674,757	0	7,674,757	0
Jumlah Penyusutan	841,561,015	787,930,954	53,630,061	6.81
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	841,561,015	787,930,954	53,630,061	6.81

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain :
Rp.0.

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan
Non Operasional :
Rp.0

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Surplus (defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp.0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal :
Rp.34,724,123,156* Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.34,724,123,156 dan Rp.35,060,396,979 .

E.2. Surplus (Defisit) LO

*Surplus(defisit) LO :
Rp.(22,789,854,203)* Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.(22,789,854,203) dan Rp.(21,821,941,433). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi
/Kesalahan
mendasar : Rp.0.* Tidak terdapat transaksi dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024

E.4. Koreksi Menambah/Mengurangi

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian Nilai
Aset : Rp.0.* Nilai Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan : Rp.0* Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Koreksi Nilai Persediaan

per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi
Aset Tetap : Rp.0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi:
Rp1,152,178,000,-

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1,152,178,000 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi nilai aset ini berasal dari tanah idle yang diperuntukkan.

Tabel 5 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024

Jenis Aset tetap	Nilai Koreksi
Tanah	1,152,178,000
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	1,152,178,000

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-
lain : Rp.0

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi antar beban, koreksi antar hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 .

Rincian Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 46 Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Utang	0
Koreksi Hibah	0
Total Koreksi Lain-lain	0

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas :
Rp.22,456,118,840

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp22,456,118,840 dan Rp21,485,667,610. Rincian Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	22,496,474,905
Diterima dari Entitas Lain	(40,356,065)
Transfer Keluar	(0)
Transfer Masuk	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	22,456,118,840

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp.(40,356,065) sedangkan

DKEL sebesar Rp.22,496,474,905.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN. Terdapat transaksi Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Tabel 48 Rincian Transfer Masuk
(dalam satuan Rupiah)

Jenis	Entitas Asal	Nilai (Rp)
-----	-----	0
-----	-----	0
Jumlah		91,481,250

Transfer keluar sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0,-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0 dari total Rp.0 yang diterima sepanjang tahun 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp.0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Pengesahan Hibah
(dalam satuan Rupiah)

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
-----	-----	0
	Total Pengesahan	0
	Pengesahan Pengembalian Hibah	0
	Jumlah	0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2024 disajikan pada lampiran.

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir :
Rp.35,542,565,793 Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.35,542,565,793 dan Rp.34,724,123,156.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK yang dapat diungkapkan dalam laporan keuangan tahun ini maupun semester lalu.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Pendapatan dan Belanja secara Akrual yang dapat dijabarkan pada Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tunjangan Fungsional yang masih harus dibayar sebesar Rp.17,080,000,- adalah kekurangan Tunjangan Fungsional an. R. Heru Wibowo, SH., MH dan Zulmahri, SH yang belum diterima untuk Bulan Desember 2024.
2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp.3,454,889,- terdiri dari Beban Langganan Internet Bulan Desember 2024 sebesar Rp.2,480,850,-, Beban Langganan Telepon Bulan Desember 2024 sebesar Rp.105,839,- dan Beban Langganan PDAM Bulan Desember 2024 sebesar Rp.868,200,-.
3. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka sebesar Rp.194,738,- adalah pendapatan dari sewa ruangan dharmayukti karini selama 9 (sembilan) Bulan yang diterima di Tahun 2024.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah:

Rekening Virtual Account pada BRI Cabang Bengkulu A/653244005121000 A.n BPG 016 PENGADILAN TINGGI BENGKULU yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0.

Nomor Surat Ijin (Perubahan Nama Rekening) dari KPPN : S-2732/WPB.12/KP.06/2020
Tanggal 16 Oktober 2020.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi DIPA ke-1 Halaman III DIPA Tanggal 19 Januari 2024
2. Revisi DIPA ke-2 Halaman III DIPA dan Pengesahan POK tanggal 20 Februari 2024
3. Revisi DIPA ke-3 Halaman III DIPA dan Pengesahan POK tanggal 22 April 2024
4. Revisi DIPA ke-4 Pengesahan POK tanggal 8 Agustus 2024
5. Revisi DIPA ke-5 Pengesahan POK tanggal 12 September 2024
6. Revisi DIPA ke-6 Pengesahan POK tanggal 16 Oktober 2024
7. Revisi DIPA ke-7 Pengesahan POK tanggal 4 Desember 2024
8. Revisi DIPA ke-8 Pengesahan POK tanggal 6 Desember 2024
9. Revisi DIPA ke-9 Pengesahan POK tanggal 20 Desember 2024

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Informasi mengenai Ralat SPM yang dapat dilaporkan dalam laporan keuangan Semester II TA 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Nomor SPM : 00013T
Tanggal SPM : 26 JANUARI 2024
Yang telah diterbitkan SP2D :
Nomor SP2D : 240161301000455
Tanggal SP2D : 29 JANUARI 2024
Koreksi dimaksud adalah karena adanya Ralat Akun
Sebelumnya 523121
Menjadi 521111

Ralat akun dimaksud karena terdapatnya kesalahan dalam penggunaan akun pada pembayaran pajak kendaraan dinas, dimana sebelumnya menggunakan akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) yang seharusnya adalah menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111)

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu antara lain sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian/Lembaga : 005 Mahkamah gung
Unit Organisasi : 01 Badan Urusan Administrasi
Satuan Kerja : 400512 Pengadilan Tinggi Bengkulu
Fungsi : 03 Ketertiban dan Keamanan
Sub Fungsi : 03.04 Peradilan
Program : 005.01.WA Program Dukungan Manajemen
Lokasi : 2600 Bengkulu

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding								
	Layanan Perkantoran	22.077.318.000	22.049.993.406	99,88	1	1	Layanan	100	Kegiatan sudah terlaksana
	Layanan Sarana Internal	122.000.000	121.680.000	99,74	8	8	Unit	100	Kegiatan sudah terlaksana
	Layanan Prasarana Internal	400.000.000	397.604.219	99,40	1	1	Unit	100	Kegiatan sudah terlaksana
	Subtotal	22.599.318.000	22.569.277.625	99,87					
	Penyesuaian Revisi DIPA ke9 Pengembalian Belanja		72.802.720						